

Judul : Kebakaran hutan & lahan mengkhawatirkan, apakah perlu dibentuk badan nasional pengendali Karhutla?
Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Kebakaran Hutan & Lahan Mengkhawatirkan

Apakah Perlu Dibentuk Badan Nasional Pengendali Karhutla?

SEJUMLAH daerah di Indonesia dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap, antara lain Bromo, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Musim kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah sepanjang Juli hingga Agustus 2026.

Di Sulawesi Selatan, sejumlah daerah seperti Kabupaten Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Kota Parepare, hingga Kota Makassar mencatat lonjakan insiden kebakaran, mulai dari lahan kering hingga permukiman warga.

Terbaru, kebakaran hebat

melanda kawasan pegunungan Gunung Nona, Kabupaten Enrekang, dan melahap setidaknya 10 hektare lahan. Kondisi di wilayah Kalimantan bahkan lebih parah.

Berdasarkan data yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan sebaran hotspot tertinggi, yakni mencapai 767 titik. Selanjutnya, Kalimantan Barat tercatat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara terdapat tiga titik.

Karhutla yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan semakin mengkhawatirkan. Kabut asap tebal tidak hanya

memperburuk kualitas udara, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas masyarakat, pendidikan, transportasi, kesehatan, hingga perekonomian.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak Pemerintah segera menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional. Menurutnya, skala dampak yang ditimbulkan sudah jauh melampaui persoalan kebakaran biasa dan membutuhkan penanganan luar biasa secara terkoordinasi.

"Kalimantan sudah seperti setengah 'neraka' sekarang karena karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana

nasional," ujar Daniel dalam keterangan persnya, Jumat (21/8/2026).

Daniel menilai Pemerintah tidak cukup hanya memantau perkembangan titik panas atau hotspot. Data tersebut, kata dia, harus segera menjadi dasar penggerakan personel dan peralatan ke lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Menurut Daniel, dampak karhutla saat ini sudah dirasakan langsung masyarakat. Kabut asap dilaporkan menyebabkan jarak pandang di sejumlah lokasi turun drastis, bahkan sangat terbatas. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan sekaligus mengganggu operasional transportasi udara.

Aktivitas pendidikan juga ikut terdampak. Sejumlah sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak harus diliburkan karena kondisi udara yang dinilai tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar mengajar secara normal.

Tidak kalah penting, Daniel meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas penyebab kebakaran. Menurutnya, pihak yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai sehingga menyebabkan karhutla harus mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain desakan agar diberlakukan status bencana nasional, Anggota Komisi IV

DPR RI Firmansyah Soebagyo juga mengusulkan adanya badan khusus untuk menangani masalah karhutla.

"Perlu pembentukan Badan Nasional Pengendali Karhutla," usulnya.

Namun, usulan pembentukan badan khusus karhutla ditolak oleh Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi. Menurut dia, adanya badan baru akan membuat birokrasi semakin panjang dan berbelit.

"Sehingga belum perlu badan khusus," katanya.

Untuk mengulas lebih jauh bagaimana pandangan Firmansyah Soebagyo dan Badiul Hadi terkait perlu atau tidaknya badan khusus karhutla, berikut petikan wawancaranya.

BADIUL HADI
Manajer Riset Seknas Fitra

Pembentukan Badan Ini Belum Diperlukan



Persoalan utamanya bukan kekurangan lembaga, melainkan lemahnya koordinasi, pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pembagian tanggung jawab antarinstansi serta pemerintah daerah.

Ada usulan agar dalam penanganan karhutla dibentuk badan khusus. Apa pandangan Anda?

Dalam pandangan saya, belum perlu membentuk Badan Nasional Pengendali Karhutla baru.

Kenapa?

Persoalan utamanya bukan kekurangan lembaga, melainkan lemahnya koordinasi, pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pembagian tanggung jawab antarinstansi serta pemerintah daerah.

Jika Anda tidak sependapat, berikan alasannya?

Menambah badan baru justru berisiko memperpanjang rantai birokrasi dan

menciptakan tumpang tindih kewenangan. Dengan kelembagaan negara yang sudah gemuk, pilihan yang lebih rasional adalah memperkuat fungsi koordinasi seluruh sumber daya nasional.

BNPB perlu diberi mandat koordinasi yang lebih kuat terhadap KLHK, Pemda, BMKG, TNI, Polri, dan dunia usaha. Pengendalian karhutla harus menjadi sistem terpadu sejak pemetaan risiko, pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum, hingga pemulihan.

Tapi, karhutla di Kalimantan kelihatannya sudah parah?

Khusus Kalimantan, pendekatan

tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika api sudah meluas. Karhutla merupakan persoalan ekologis, tata kelola lahan, ekonomi, dan perlindungan masyarakat yang membutuhkan kebijakan pencegahan jauh sebelum musim kebakaran terjadi.

Bagaimana dengan usulan karhutla dijadikan bencana nasional?

Saya kira penetapan status kebencanaan harus mempertimbangkan banyak hal. Status tersebut harus berbasis indikator objektif, seperti luas dan intensitas bencana, jumlah korban, dampak sosial-ekonomi, gangguan pelayanan publik, kerusakan lingkungan, serta kemampuan daerah yang sudah terlampaui. ■ REN

FIRMAN SOEBAGYO
Anggota Komisi IV DPR RI

Badan Ini Bertanggung Jawab Ke Presiden



Karhutla bukan lagi persoalan rutin tahunan, tetapi juga berdampak besar terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian di daerah dan pusat.

Saat ini, karhutla terjadi di beberapa daerah dan Anda menyarankan agar dalam penanganan karhutla dibentuk badan baru?

Kami menyarankan agar Pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah, yakni Badan Nasional Pengendali Karhutla.

Apa alasannya?

Karena karhutla bukan lagi persoalan rutin tahunan, tetapi juga berdampak besar terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian di daerah dan pusat.

Nantinya, badan khusus ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Apa lagi alasan yang mendesak untuk pembentukan badan ini?

Selama ini, penanganan karhutla terkendala koordinasi lintas lembaga, keterbatasan personel dan armada pemadaman, serta penegakan hukum yang belum memberikan efek jera.

Apa saja tugas dan fungsi badan khusus ini?

Badan tersebut nantinya fokus pada pencegahan, pemadaman, penindakan hukum, dan pemulihan lahan.

Selain itu, badan khusus ini juga nantinya memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan pembakaran.

Lalu, bagaimana dengan usulan agar karhutla juga ditetapkan sebagai bencana nasional?

Kami juga mengusulkan agar Presiden menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

Dengan dampak yang sebesar ini, karhutla sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Kami juga mendorong Pemerintah memberikan Keppres terkait status bencana nasional serta meminta masyarakat dan perusahaan berkomitmen menerapkan prinsip zero learning.

Menjaga hutan adalah menjaga napas bangsa. Kita tidak akan membiarkan masalah ini terus berulang dan memberikan kerugian hingga triliunan rupiah. ■ REN